

Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap *Blue Economy Development Framework* di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat

Compliance of Local Government on Blue Economy Development Framework at Majene Regency, West Sulawesi

*Saomi Rizqiyanto dan Dwi Rianisa Mausili

Universitas Sulawesi Barat

Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Talumung, Baurung, Kec. Banggae Tim., Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 20 Maret 2025
Perbaikan naskah: 17 Juni 2025
Disetujui terbit : 30 Juni 2025

Korespondensi penulis:
Email: saomirizqiyanto@unsulbar.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v20i1.15450>



ABSTRAK

Kabupaten Majene memiliki potensi pengembangan ekonomi biru yang luar biasa, namun potensi ini belum dimaksimalkan sebagai sumber ekonomi masyarakat maupun pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor perikanan dan pariwisata yang relatif kecil dibanding sektor lainnya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengeluarkan cetak biru pengembangan ekonomi berbasis kelautan yakni *Blue Economy Development Framework* (BEDF), sebagai panduan bagi pemerintah daerah yang ingin mengembangkan ekonomi berbasis kelautan. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, mengetahui adopsi kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Kabupaten Majene terhadap pengembangan ekonomi biru berdasarkan *Blue Economy Development Framework*, kedua, mengetahui penerapan dan pengembangan konsep ekonomi biru di Kabupaten Majene, terakhir ingin mengetahui hambatan pengembangan konsep ekonomi biru di Majene. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *depth interview* sebagai sumber data primer dan studi literatur sebagai data komplementer sementara hasilnya diolah dengan menggunakan analisis konten. Kabupaten Majene belum mengadopsi BEDF dalam pengembangan ekonomi berbasis kelautan. Disarankan supaya Pemerintah Kabupaten Majene menyesuaikan kebijakan pengembangan ekonomi biru berdasarkan BEDF dengan memperhatikan skala prioritas seperti pengembangan infrastruktur ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja serta pemberian insentif bagi pelaku usaha ekonomi biru dengan pangsa pasar ekspor.

Kata Kunci: ekonomi biru, BEDF, Majene, Bappenas, OECD

ABSTRACT

Majene Regency has extraordinary potential for developing a blue economy; however, this potential has not been fully maximized as a source of community economic growth or regional income. This is evident from the relatively small contribution of the fisheries and tourism sectors compared to other sectors. The National Development Planning Agency has issued a blueprint for developing a marine-based economy, known as the *Blue Economy Development Framework* (BEDF), as a guide for local governments seeking to establish a marine-based economy. The objectives of this study are: first, to determine the adoption of policies issued by the Majene Regency government towards developing a blue economy based on the *Blue Economy Development Framework*; second, to determine the implementation and development of the blue economy concept in Majene Regency; and finally, to determine the obstacles to developing the blue economy concept in Majene. This study employed the in-depth interview method as the primary data source and literature studies as complementary data, with the results analyzed using content analysis. Majene Regency has not adopted BEDF in developing a marine-based economy. It is recommended that the Majene Regency Government adjust its blue economy development policy based on the BEDF by considering priority scales, such as the development of economic infrastructure that absorbs a large workforce, and providing incentives for blue economy business actors with a significant export market share.

Keywords: blue economy, BEDF, Majene, Bappenas, OECD

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat luar biasa. Sebagian besar luas wilayahnya didominasi oleh laut. Data menyebutkan sekitar 60% atau 6.400.000 km² dari total luas wilayah Republik Indonesia didominasi oleh laut (PUSHIDROSAL, 2018). Potensi lainnya bisa dilihat dari keanekaragaman hayati yang dimiliki, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan 17.000 pulau, Indonesia memiliki 8500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies

terumbu karang. Besaran wilayah ditambah dengan keanekaragaman hayati didalamnya membuat potensi ekonomi kelautan sangat luar biasa. Data menyebut bahwa Indonesia bisa mendapatkan potensi ekonomi sebesar 19.6 triliun per tahun (Anna, 2020).

Hanya saja, nilai ekonomi laut yang luar biasa ini belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian nasional masih sangat minim. Data Kementerian Keuangan dalam Laporan PDB Tahunan menyebut bahwa sektor kelautan dan perikanan Indonesia hanya menyumbang sekitar

2,8% dari total ekonomi nasional. Lebih jauh lagi, pangsa pasar perikanan Indonesia di industri global masih sekitar 3,5% saja. Data ini tentu membuat pertanyaan besar, antara potensi dengan realisasi masih jauh dari harapan (Sugandhi, 2022).

Kesenjangan ini ternyata searas dengan pengembangan ekonomi kelautan di daerah-daerah. Salah satu contoh dari kesenjangan ini terjadi di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten ini memiliki luas laut sebesar 1000 km² dengan garis pantai sepanjang 125 km, tentunya memiliki potensi ekonomi yang luar biasa namun apa daya, kontribusi sektor kelautan dan perikanan daerah Majene dalam APBD ternyata masih sebesar 5%.

Kesenjangan antara potensi dengan realisasi membuat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional membuat sebuah cetak biru atau peta jalan (*road map*) pengembangan ekonomi kelautan dan kemaritiman. BAPPENAS mengakomodir dokumen roadmap Bank Dunia membuat *Blue Economy Development Framework for Indonesia Economic Transformation*. Dokumen ini merupakan roadmap atau peta jalan pengembangan ekonomi kelautan atau yang sekarang disebut dengan ekonomi biru.

Ekonomi biru sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas ekonomi yang terkait dengan laut. Bank Dunia mendefinisikan ekonomi biru sebagai “penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk memberi manfaat bagi perekonomian, mata pencaharian, dan kesehatan ekosistem laut”. Ekonomi biru diperkirakan bernilai lebih dari US\$1,5 triliun per tahun secara global dan menyediakan lebih dari 30 juta lapangan kerja dan memasok sumber protein penting bagi lebih dari tiga miliar orang (McBain, 2023).

Blue Economy Development Framework (*BEDF*) adalah cetak biru dari Bank Dunia yang menjadi tolok ukur pengembangan dokumen serupa yang mulai diadopsi oleh banyak negara maupun banyak organisasi regional. Pengembangan ekonomi ini dirasa perlu untuk dibuat aturan hukum agar, ekonomi biru ini senantiasa membarikan manfaat ekonomi - namun juga harus berkelanjutan dalam rangka menjaga keberlangsungan ekosistem laut.

Pemerintah Indonesia sendiri melalui BAPPENAS sudah mengadopsi *BEDF* dengan menyusun *Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economy Transformation* yang sudah dibuat dengan menyesuaikan kondisi ekonomi dan kelautan di Indonesia. Pertanyaan garis besarnya adalah apakah kerangka kerja ini sudah diadopsi dalam bentuk kebijakan Pemerintahan Daerah?

Bagaimana implementasinya? Apakah memiliki kendala dalam menerapkan kebijakan tersebut. Signifikansi dari penelitian ini adalah ingin mengukur kepatuhan dan implementasi *BEDF* dalam kebijakan pemerintahan daerah khususnya di Kabupaten Majene.

Dari latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut; pertama bagaimana konsep pengembangan ekonomi biru yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, apakah pemerintah daerah sudah memiliki garis besar pengembangan ekonomi biru berdasarkan dokumen *BEDF* dari Bappenas dan Bank Dunia? Hal ini untuk melihat bagaimana kepatuhan pemerintah daerah terhadap konsep pengembangan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Hal lain yang bisa digali lebih dalam adalah bagaimana pemerintah daerah memiliki kepekaan terhadap potensi ekonomi dan potensi kerjasama yang bisa dikembangkan dari daerahnya, dalam hal ini adalah kabupaten Majene.

Rumusan masalah kedua adalah bagaimana penerapan pengembangan ekonomi biru yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Majene? Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimanapun Pemerintah Daerah sadar akan kondisi geografi wilayah Majene yang mayoritas adalah wilayah pesisir dan laut, oleh karenanya bisa disimpulkan sebenarnya bahwa masyarakat Majene mayoritas bersandar pada ekonomi kelautan, bagaimana pemerintah daerah mengakomodir kebutuhan masyarakat yang beraktifitas ekonomi di laut?

Rumusan masalah yang kedua menghantarkan pada rumusan masalah terakhir yaitu, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan atau menerapkan konsep ekonomi biru? Terbentuknya rumusan masalah ini didasarkan pada minimnya kontribusi sektor ekonomi biru terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majene maupun Provinsi Sulawesi Barat sementara asumsi yang berjalan adalah pemerintah daerah memiliki konsep pengembangan ekonomi biru.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, tentunya yang selaras dengan rumusan masalah yang telah kami paparkan, beberapa hal yang ingin peneliti capai. Pertama, penelitian ini bertujuan mengungkap konsep pengembangan ekonomi biru yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, apakah pemerintah daerah kabupaten majene sudah memiliki dokumen kebijakan pengembangan ekonomi biru berdasarkan

dokumen *Blue Economy Development Framework* dari Bappenas dan Bank Dunia? Hal ini untuk melihat bagaimana kepatuhan pemerintah daerah terhadap konsep pengembangan yang digariskan oleh pemerintah pusat.

Kedua, penelitian ini bertujuan penerapan pengembangan ekonomi biru yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Majene. Tim peneliti berasumsi bahwa pemerintah daerah sadar akan kondisi geografi wilayah Majene yang mayoritas adalah wilayah pesisir dan laut yang sebagian besar masyarakat Majene bersandar pada ekonomi kelautan, penelitian ini ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pemerintah daerah mengakomodir kebutuhan masyarakat yang beraktifitas ekonomi di laut.

Tujuan penelitian ketiga adalah-mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Majene dalam menjalankan atau menerapkan konsep ekonomi biru. Terbentuknya rumusan masalah ini didasarkan pada minimnya kontribusi sektor ekonomi biru terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majene maupun Provinsi Sulawesi Barat sementara asumsi yang berjalan adalah pemerintah daerah memiliki konsep pengembangan ekonomi biru.

Penelitian ini sangat penting mengingat kontribusinya yang bisa dijadikan bahan masukan kebijakan baik bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kabupaten Majene memiliki daerah yang sebagian besar belum tergarap dengan optimal. Salah satu faktor yang menyebabkan pembangunan wilayah laut belum optimal adalah karena Provinsi Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Majene termasuk daerah pemekaran baru yang masih membutuhkan kajian dan pengembangan sehingga pembangunan daerah bisa lebih optimal. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian dan masukan bagi pengembangan kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga pengembangan ekonomi biru bisa lebih terarah dan terukur.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dengan lokus pada tempat-tempat penerapan ekonomi biru seperti lokasi pariwisata, industri perikanan, industri galangan kapal, akuakultur serta UMKM. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu satu tahun dalam rentang Mei - Desember 2024.

Jenis dan Metode Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun data sekunder. Data primer dikumpulkan tim peneliti dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata, selain itu tim peneliti juga melakukan wawancara kepada pelaku industri galangan kapal dan petani tambak. Masing-masing entitas diwakili oleh satu narasumber utama didampingi oleh narasumber pendamping. Sementara data sekunder dalam penelitian ini juga didapat dari temuan-temuan yang ada dalam beberapa jurnal penelitian, berikut juga dengan analisis para ahli yang terdapat di lembaga riset, informasi dari pihak media maupun pendapat para ahli yang ada di dalam literatur.

Metode Analisis

Tim Peneliti dalam kajian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yakni suatu pendekatan kualitatif dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, maupun kesatuan lainnya seperti budaya maupun kebijakan yang terikat oleh waktu melalui pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dari berbagai sumber (Creswell, 2007).

Sementara dalam metode analisis data, peneliti dalam hal ini menggunakan pendekatan *content analysis* dimana peneliti melakukan analisa data hasil wawancara dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan ekonomi biru di Kabupaten Majene seperti Dinas Kelautan dan Perikanan dan observasi secara mendalam pada objek-objek ekonomi biru seperti industri galangan kapal untuk kemudian menghasilkan temuan, konsep atau teori baru. Keunggulan dari analisis konten ini adalah bisa digunakan untuk semua jenis data baik hasil wawancara, pengamatan tertulis, jurnal, foto maupun grafik yang ada di website untuk dijadikan sumber analisis. (Bengtsson, 2016).

Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap kejadian yang ada di Kabupaten Majene, bagaimana fakta dan kondisi di lapangan serta data yang ditampilkan dalam kanal saluran resmi pemerintah dalam hal ini BPS Kabupaten Majene. Setelah itu, tim peneliti melakukan pengumpulan data baik melalui wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan dan pelaku industri, melakukan fotografi sebagai bukti empiris. Setelah mendapatkan data baik primer maupun sekunder, tim peneliti melakukan transkripsi data maupun pengkodean data.

Setelah mendapatkan data dan melakukan transkripsi pengkodean data, tim peneliti melakukan interpretasi data dan penyajian data untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkap beberapa hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yakni konsep penerapan ekonomi biru yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, berikut dengan pengembangan dan potensi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, serta tantangan dan hambatan yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten majene.

Blue Economy Development Framework (BEDF) yang kemudian diadopsi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Kerangka Pengembangan Ekonomi Biru untuk Transformasi Ekonomi Indonesia memberikan dasar yang kuat bagi perumusan kebijakan yang lebih baik dan implementasi ekonomi biru yang efektif di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan peluang beragam kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan pesisir, sekaligus mendorong pembangunan jangka panjang, penelitian, dan kemajuan inovatif dalam ekonomi biru, mengidentifikasi tantangan implementasi dan memanfaatkan serta mengelola sumber daya laut Indonesia yang sangat besar dan kegiatan ekonomi berbasis kelautan untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Kerangka ini dibagi menjadi lima bab dan mengikuti struktur berikut: 1) Pendahuluan; 2) Konteks pembangunan, meliputi: krisis Covid-19 dan tantangan perekonomian negara; transformasi Indonesia menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan; pentingnya pengembangan Ekonomi Biru bagi transformasi perekonomian Indonesia; Ekonomi Biru untuk pembangunan ekonomi lokal dan tujuan pembangunan berkelanjutan; 3) Kerangka Ekonomi Biru Berkelanjutan untuk

Indonesia, meliputi: misi inti; konsep dan ruang lingkup; Sektor Ekonomi Biru dan sektor negara berkembang; perkembangan Ekonomi Biru saat ini; ekosistem pemungkin bagi Indonesia; 4) Analisis ekonomi terhadap potensi Ekonomi Biru, meliputi: sektor tradisional; sektor-sektor baru; pengelolaan lingkungan dan sumber daya; 5) Tonggak sejarah Ekonomi Biru yang berkelanjutan (Pane, 2022).

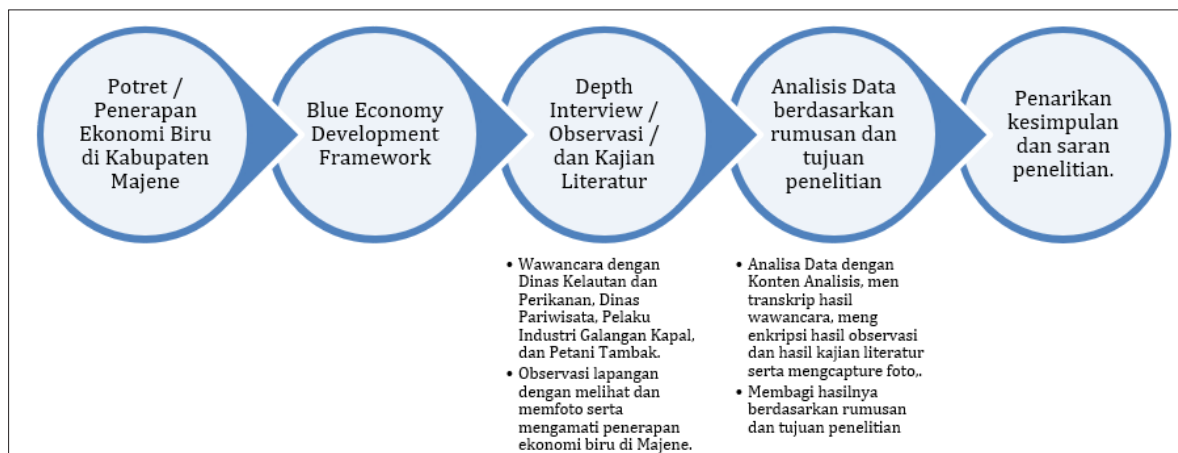
Ekonomi kelautan berkelanjutan menekankan pada pemanfaatan berkelanjutan dan konservasi sumber daya alam di lautan, lautan, dan wilayah pesisir dunia untuk pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan *Sustainable Development Goals* 2030, termasuk kegiatan ekonomi berbasis lautan dan pesisir yang secara eksplisit mengintegrasikan keberlanjutan dan aktivitas spesifik. tindakan untuk mengurangi polusi laut dan meningkatkan kesehatan laut, untuk melestarikan ekosistem laut dan pesisir, untuk meningkatkan ketahanan dan aksi iklim. Pendekatan ini akan memberikan lebih banyak nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja lokal, melalui investasi asing di industri berbasis kelautan untuk meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global, dan nilai tambah yang lebih tinggi dari produk berbasis kelautan. Industri perikanan juga dapat memperoleh keuntungan dari pendekatan ini, karena permintaan terhadap perikanan meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk, sementara pada saat yang sama masyarakat, khususnya di wilayah pesisir, perlu meningkatkan penghidupan mereka. (Pane, 2022).

Sektor Ekonomi Berdasarkan *Blue Economy Development Framework*

1. Sektor Mapan

a. Perikanan Tangkap

Pada tahun 2010, nilai tambah global dari industri perikanan tangkap diperkirakan sekitar



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian.

USD 21 miliar. NAFTA menyumbang bagian terbesar dari nilai tambah ini yaitu hampir USD 6 miliar, diikuti oleh Eropa dan Asia. Berdasarkan perhitungan OECD, nilai tambah tertinggi dari perikanan laut ditemukan di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, menghasilkan USD 40 miliar pada tahun 2015, diikuti oleh negara-negara berpenghasilan tinggi (sekitar USD 20 miliar) dan negara-negara berpenghasilan menengah ke atas (USD 10 miliar) (OECD, 2020). Secara global, industri perikanan tangkap mendukung sekitar 11 juta pekerjaan penuh waktu. Pada tahun 2010, Asia dan Oseania memiliki jumlah pekerjaan tertinggi di bidang perikanan tangkap, dengan sekitar 7 juta pekerjaan penuh waktu.

b. Akuakultur

Akuakultur dianggap sebagai salah satu sektor dengan potensi pertumbuhan paling luar biasa (FAO, 2018). Sektor ini telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir, meningkatkan total produksi ikan di tengah tren penangkapan ikan ilegal yang semakin stagnan. Pada tahun 2016, produksi akuakultur global, termasuk produksi darat dan laut, mencapai 110,2 juta ton dan bernilai sekitar 243,5 miliar USD (FAO, 2018). Setidaknya 64,2% produksi akuakultur dilakukan di darat dan didominasi oleh ikan air tawar seperti spesies ikan mas. Akuakultur pesisir mencakup spesies yang dibudidayakan di kolam air asin, seperti udang, dan spesies yang diproduksi di kandang dan bangunan buatan, baik yang berdekatan dengan pantai atau di pantai, seperti rumput laut dan moluska.

Pengembangan akuakultur laut dapat menjadi peluang bagi beberapa negara berkembang, meskipun hal itu harus dilakukan tanpa merusak ekosistem pesisir. Akuakultur dapat menyediakan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat pesisir yang rentan yang mungkin bergantung pada pertanian atau perikanan. Selain itu, perbaikan teknis dalam sistem akuakultur telah meningkatkan efisiensi pakan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyak sistem sekarang mencapai rasio konversi pakan yang sebanding dengan sistem unggas. Namun, ada variasi yang signifikan (Fry *et al.*, 2018). Proyek akuakultur laut terbuka yang lebih kompleks yang masih dalam tahap demonstrasi juga berpotensi untuk produksi ikan yang lebih berkelanjutan (OECD, 2019).

c. Pengolahan Hasil Laut

Nilai tambah global dari pengolahan ikan pada tahun 2010 diperkirakan mencapai USD 79 miliar. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa, bila

dikombinasikan dengan produksi perikanan tangkap dan akuakultur yang intensif, Asia menciptakan nilai tambah yang paling menonjol, yaitu sebesar 54 persen dari nilai tambah global dalam pengolahan ikan, diikuti oleh Afrika dan Timur Tengah (16 persen) dan Eropa (14 persen). Tiongkok, India, India, Vietnam, Peru, Amerika Serikat, Myanmar, Federasi Rusia, Jepang, Bangladesh, Norwegia, Filipina, dan Thailand merupakan pemain utama dunia dalam pengolahan makanan laut. Pada tahun 2010, jumlah total pekerjaan penuh waktu dalam industri pengolahan ikan adalah sekitar 2,4 juta. Sebagian besar pekerjaan ini tercipta di negara-negara di Asia, yang juga merupakan kawasan penting untuk pengolahan ikan.

Secara keseluruhan, jutaan orang, terutama perempuan, terlibat dalam pengolahan ikan tradisional, menjadikannya industri berbasis kelautan yang penting di negara-negara berkembang, meskipun ada tantangan umum (OECD, 2020). Fasilitas pasca panen seperti peralatan pengeringan, pabrik es, dan fasilitas penyimpanan dingin seringkali tidak memadai. Fasilitas tersebut diperlukan untuk menambah nilai pada produk makanan laut dan mendapatkan harga yang lebih baik, tetapi juga untuk mengurangi kerugian pasca panen yang terjadi pada perikanan tradisional (Rosales *et al.*, 2017). Ketika tidak ada fasilitas penyimpanan di pelabuhan bebas es, nelayan terkadang cenderung menjual ikan yang tidak terjual dengan harga yang jauh lebih rendah atau terpaksa berurusan dengan pembusukan hasil tangkapan mereka. Organisasi Pangan dan Pertanian memperkirakan bahwa sekitar 35% dari panen global hilang atau terbuang setiap tahun (FAO, 2020). Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di seluruh sistem produksi ikan sangat bergantung pada peningkatan pengolahan pasca panen, serta lebih jauh mengeksplorasi praktik perikanan berkelanjutan.

d. Pelabuhan

Pada tahun 2009, nilai langsung dari total volume pelabuhan global diperkirakan sekitar 193 miliar USD, berdasarkan Basis Data Aktivitas Pelabuhan Global ITF OECD, yang mencakup 830 pelabuhan terbesar di dunia dalam hal tonase dan hampir semua penanganan kargo global. Gambar 3.4 menunjukkan bahwa Asia menyumbang sekitar 102 miliar USD bagi ekonomi global, yang merupakan lebih dari setengah nilai tambah global dari aktivitas pelabuhan. Asia menyumbang 53% dari volume pelabuhan dunia, diikuti oleh Eropa (23%), NAFTA (9%), Amerika Selatan (6%), Oseania (5%), dan Afrika (1%). Pada tahun 2009, lebih dari 1,7 juta pekerjaan penuh waktu diperkirakan secara

langsung didukung oleh aktivitas pelabuhan global (lihat Liebender *et al.* [akan segera hadir] untuk rinciannya). Survei dampak yang dilakukan untuk Laporan Sintesis OECD tentang Daya Saing Kota Pelabuhan Global (Merk, 2013) juga menunjukkan bahwa sekitar 800 pekerjaan secara langsung atau tidak langsung diciptakan oleh aktivitas pelabuhan dengan volume rata-rata satu juta ton.

e. Pembuatan dan Perbaikan Kapal (*Shipbuilding and Repair*)

Pada tahun 2010, total kargo yang dibangun mencapai 96,4 juta GT (Gross Tonnage), dengan mayoritas berasal dari konstruksi peti kemas, curah dan tanker, yang berjumlah sekitar 77 juta GT. Nilai kapal yang diselesaikan pada tahun itu diperkirakan mencapai 58 miliar USD. Asia diperkirakan memiliki pangsa pasar terbesar, sebesar 47%, diikuti oleh Eropa (25%) dan Amerika Utara (23%). Pada tahun 2010, terjadi lonjakan signifikan dalam pembuatan kapal, yang menyebabkan kelebihan kapasitas. Sekitar 1,9 juta orang terlibat dalam pekerjaan pembuatan dan perbaikan kapal pada tahun itu. Karena sebagian besar galangan kapal terletak di negara-negara Asia, sebagian besar pekerjaan ada di wilayah ini, khususnya di Cina, Indonesia, Jepang dan Korea. Negara-negara ini menyumbang lebih dari 60% dari total pekerjaan di industri pembuatan dan perbaikan kapal global.

f. Minyak dan Gas Perairan Dangkal

Industri minyak dan gas alam lepas pantai, khususnya di perairan dangkal, merupakan bagian terpenting dari ekonomi laut saat ini dan memberikan kontribusi signifikan bagi banyak negara berkembang, khususnya di Afrika dan Amerika Latin, meskipun ada dampak lingkungan yang signifikan (OECD, 2020b). Proyek-proyek juga sedang berlangsung di Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Vietnam, dengan sekitar 60% dari produksi saat ini di wilayah Asia Tenggara berasal dari ladang-ladang lepas pantai yang terletak di perairan dangkal dengan kedalaman kurang dari 450 meter. Pada tahun 2019, proyek-proyek lepas pantai menghasilkan hampir USD 90 miliar dalam arus kas untuk perusahaan-perusahaan eksplorasi dan produksi yang diperdagangkan secara publik, menjadikannya tahun ketiga yang paling menentukan dalam dekade terakhir dalam hal pendapatan (Bousso, 2020). Pandemi COVID-19 membuat industri ini terhenti mendadak pada awal musim semi 2020 karena permintaan anjlok pada saat pasokan, yang sudah kewalahan, masih tumbuh secara signifikan (IEA, 2020). Ini akan memiliki

dampak ekonomi yang substansial pada banyak negara berkembang.

Momentum untuk lisensi ekstraksi baru didorong oleh hasil program eksplorasi minyak dan gas terkini, khususnya di lepas pantai Atlantik. Penemuan endapan besar di lepas pantai Senegal di cekungan MSGBC (Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, dan Guinea Ekuatorial) sejak 2015 adalah salah satu contohnya. Beberapa negara di kawasan tersebut telah berupaya mengembangkan dan menyusun industri lokal mereka melalui pelatihan, serta memperkuat lembaga regulasi untuk menangani aspek lingkungan dari perkembangan ini. Mengingat ketidakpastian permintaan minyak dan pemulihan harga dalam jangka pendek hingga menengah, investasi dalam beberapa proyek minyak dan gas lepas pantai kemungkinan akan tertunda atau dibatalkan karena harga rendah yang disebabkan oleh penurunan permintaan dan kelebihan pasokan.

g. Manufaktur dan Konstruksi Kelautan

Pada tahun 2010, nilai tambah global dari peralatan kelautan diperkirakan mencapai USD 168 miliar, dengan Asia sebagai kontributor paling signifikan. Lebih dari tiga perempat pasar global dikuasai oleh Asia, dengan China dan Korea menguasai lebih dari setengahnya. Jepang, negara-negara Asia lainnya, UE-28, dan seluruh dunia masing-masing menguasai 12%. Menurut Balance Technology Consulting (2014), sektor peralatan kelautan mempekerjakan 2,1 juta pekerja penuh waktu pada tahun 2010.

h. Layanan Bisnis Kelautan

Layanan bisnis maritim adalah sektor yang berkembang dalam ekonomi maritim. Ini meliputi asuransi dan keuangan, konsultasi maritim, penyewaan, layanan teknis, inspeksi dan survei, pasokan tenaga kerja, dan kegiatan terkait lainnya. Namun, data tentang aktivitas layanan bisnis maritim global tidak terdokumentasi dengan baik, sebagian karena kesulitan mengakses data di tingkat internasional. Sebagai referensi, sebuah studi tahun 2016 oleh PwC melaporkan bahwa layanan bisnis maritim menyumbang £4,4 miliar setiap tahunnya bagi ekonomi Inggris dan secara langsung mendukung lapangan kerja bagi 10.000-11.000 orang. Laporan tersebut mendefinisikan kontribusi langsung sebagai kontribusi dari setiap sektor dalam hal biaya karyawan, laba (sebelum depresiasi) dan kontribusi pajak. Kontribusi tidak langsung mencakup permintaan tambahan yang tercipta dalam rantai pasokan untuk layanan maritim. Sebaliknya, kontribusi yang diinduksi adalah efek dari konsumsi

tambahan karyawan (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang bekerja di sektor tersebut.

i. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Pendidikan

Penelitian dan pendidikan kelautan merupakan kunci bagi keberlanjutan maritim. Upaya di bidang ini bertujuan untuk menjadikan ekonomi biru lebih kompetitif dan berkelanjutan di masa mendatang. Sektor-sektor ini meliputi peningkatan literasi, keterampilan, dan inovasi dalam ekosistem laut, serta memastikan kelangsungan hidup satwa liar laut.

Penelitian ilmiah kelautan dan pesisir sangat penting untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi pengembangan kebijakan dan intervensi pengelolaan kelautan dan pesisir. Meskipun keterbatasan teknologi dan kompleksitas lautan, kemampuan penelitian kelautan telah meningkat secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara pesisir juga mengakui pentingnya penelitian ilmiah kelautan bagi pembangunan ekonomi dan industri, karena pencegahan pencemaran laut yang efektif memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan laut.

j. Pariwisata Pesisir

Pariwisata pesisir dan bahari mencakup berbagai bentuk, termasuk menyelam, arkeologi bahari, berselancar, berlayar, ekowisata, dan memancing rekreasi. Kawasan pesisir menyumbang 80% pariwisata, dengan pantai dan terumbu karang menjadi tujuan utama. Pariwisata pesisir juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Misalnya, sektor pariwisata di Indonesia menyumbang sekitar 8,5% dari PDB dan merupakan sumber pendapatan dan lapangan kerja yang signifikan (OECD, 2020b). Kontribusi langsung terhadap PDB adalah setengah dari jumlah tersebut, tetapi kontribusi tidak langsung dari sektor hilir kemungkinan akan jauh lebih tinggi. Pada tahun 2017, sektor ini menyediakan 12,7 juta pekerjaan, yang mewakili 10,5% dari total lapangan kerja.

Namun, meskipun pendapatan yang dihasilkan dari pariwisata pesisir sangat besar, pengembangan pariwisata dapat menyebabkan masalah lingkungan, seperti (i) hilangnya habitat yang berharga seperti terumbu karang; (ii) penggunaan lahan basah dan bakau untuk infrastruktur pariwisata; (iii) konsumsi sumber daya yang besar, termasuk sumber makanan dan air tawar lokal; dan (iv) polusi yang disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak diolah dan

sejumlah besar limbah padat. Parafrase: Turis, terutama dari negara-negara Asia, semakin memilih kapal pesiar, dengan industri ini tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 34% sejak 2012 (OECD, 2020c). Namun, industri kapal pesiar juga menghadapi tantangan, seperti emisi udara dari pembakaran bahan bakar dan pemindahan pemberat dari spesies akuatik invasif.

Apabila pariwisata pesisir tidak dikelola dengan baik, maka akan muncul beberapa risiko. Pertama, pendapatan akan menurun akibat rusaknya bentang alam yang menjadi daya tarik wisatawan dan warga sekitar. Kedua, rusaknya reputasi dan hilangnya pelanggan akibat pelanggaran lingkungan yang terjadi atau yang dipersepsikan. Ketiga, terganggunya operasional, denda, atau tuntutan hukum akibat masalah lingkungan (seperti alih fungsi lahan pembuangan limbah) dan, tidak terpenuhinya standar lingkungan, serta hilangnya izin beroperasi di wilayah tertentu. Namun, apabila pariwisata pesisir dikelola dengan prinsip berkelanjutan, maka akan muncul beberapa manfaat. Pertama, biaya dapat dihemat melalui pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Kedua, pasar pariwisata berkelanjutan akan berkembang, dan brand akan semakin kuat untuk dipasarkan kepada pelanggan serta terjalin hubungan dengan pemerintah. Ketiga, wilayah operasional dapat diperluas untuk dikembangkan. Terakhir, akan muncul pendapatan baru dari pelanggan.

Pariwisata bahari yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang vital dan berkelanjutan bagi banyak negara, termasuk negara kepulauan kecil yang sedang berkembang (SIDS) dan negara pesisir yang kurang berkembang. Pariwisata berkelanjutan dapat menjadi bagian dari ekonomi biru, yang mempromosikan perlindungan dan penggunaan berkelanjutan lingkungan dan spesies laut, menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal (sehingga mengurangi kemiskinan), dan menjaga serta menghormati budaya, tradisi, dan warisan lokal.

k. Pertahanan Banjir Pantai (Pengerukan)

Pertumbuhan penduduk telah menyebabkan peningkatan eksploitasi ekosistem pesisir dan sumber daya alam, serta peningkatan polusi. Sejak pergantian abad, migrasi ke lokasi pesisir telah meningkat. Menurut Atlas PBB 2010, satu dari tiga orang di dunia sekarang tinggal dalam jarak 100 kilometer dari laut, dan 44 persen dari populasi dunia tinggal dalam jarak 150 kilometer dari pantai (lebih dari populasi dunia pada tahun 1950). Kepadatan

penduduk rata-rata di zona pesisir adalah tiga kali lipat dari wilayah lain, dan dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan penduduk pesisir telah melampaui pertumbuhan masyarakat pedalaman (Crawford Heitzmann, 2006). Pola ini diperkirakan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Menurut Neumann *et al.* (2015), populasi delta dan dataran banjir, daerah yang paling rentan terhadap banjir, diperkirakan akan tumbuh dengan cepat - sebesar 50 persen antara tahun 2000 dan 2030. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan pertahanan banjir pesisir atau pengerukan sebagai salah satu sektor berbasis laut yang ada untuk ditangani dalam pengembangan ekonomi biru.

Sektor yang sedang berkembang

a. Energi Terbarukan

Elektrifikasi merupakan tantangan penting di banyak negara berpendapatan menengah dan rendah yang masih bergantung pada bahan bakar fosil impor untuk pembangkitan energi. Biaya bahan bakar fosil telah membebani anggaran pemerintah, bisnis, dan rumah tangga serta secara tidak proporsional memengaruhi orang-orang yang sudah berjuang melawan kemiskinan (OECD, 2020b). Untuk mengurangi biaya energi dan beralih ke jalur pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi, beberapa solusi energi terbarukan sedang diuji berkat inovasi terkini di ladang angin lepas pantai serta sumber daya surya dan panas bumi. Namun, sumber energi terbarukan ini sering kali dikombinasikan dengan generator diesel agar efektif di negara-negara berkembang.

Porsi energi terbarukan dalam memenuhi permintaan energi global diperkirakan akan meningkat seperlima selama periode 2018–2023, mencapai 12,4 persen pada tahun 2017 (IEA, 2019). Angin lepas pantai, khususnya, merupakan sektor yang tumbuh pesat (IEA, 2019). Sektor ini telah tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa selama 20 tahun terakhir di negara-negara maju dan berkembang, dari hampir nol hingga total kapasitas global sebesar 18 gigawatt (GW) pada tahun 2017. Biaya pembangkitan angin lepas pantai juga telah menurun secara progresif, dan proyeksi menunjukkan bahwa angin lepas pantai dapat mencapai antara 15 dan 21 GW per tahun pada tahun 2025 dan 2030 (GWEC, 2019). Pertumbuhan ini diharapkan tidak hanya di Eropa, Tiongkok, dan negara-negara OECD tetapi juga di beberapa negara berkembang di mana angin lepas pantai dapat memperluas akses listrik dan meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi, dengan demikian berkontribusi pada

komitmen yang dibuat berdasarkan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Namun, dampak jangka panjang dari ladang angin lepas pantai berskala besar terhadap lingkungan laut perlahan mulai dipertimbangkan.

b. Bioteknologi Kelautan

Hingga saat ini, potensi sumber daya hayati laut masih belum dimanfaatkan secara maksimal, meskipun banyak negara berkembang memiliki sumber daya laut yang luas dan berharga seperti karang, spons, dan ikan (OECD, 2020b). Seiring dengan semakin dikenalnya proses kelautan, banyak negara tengah mengembangkan strategi untuk mempromosikan bioteknologi laut guna mengembangkan obat-obatan farmasi dan produk kosmetik masa depan untuk kesehatan dan kesejahteraan, serta untuk produksi pangan menggunakan alga, biofuel, dan lain-lain. (OECD, 2017). Penelitian sumber daya hayati laut sudah sangat penting di banyak sektor, misalnya, di sektor farmasi, untuk pengembangan antibiotik generasi baru. Sumber daya genetika laut dapat menjadi inti solusi baru untuk memerangi pandemi.

Semakin banyak negara berkembang telah mengintegrasikan dimensi bioresource laut ini ke dalam strategi ekonomi laut masing-masing, termasuk Seychelles, dan lebih banyak lagi yang melakukan hal yang sama. Namun, kesenjangan antara negara maju dan berkembang dalam bioprospecting semakin melebar, dengan sepuluh negara maju yang menguasai lebih dari 98% paten yang terkait dengan gen laut (Blasiak *et al.*, 2018). Meskipun ada konvensi internasional tentang perlindungan keanekaragaman hayati (misalnya, Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya tentang Akses ke Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Setara yang Timbul dari Pemanfaatannya), hanya sedikit perusahaan multinasional yang menggunakan paten untuk memperoleh sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional. Satu perusahaan – BASF, yang berkantor pusat di Jerman dan produsen kimia terbesar di dunia – mendaftarkan 47% dari semua sekuens paten berdasarkan gen laut. Yeda Research and Development Co. Ltd., lengan komersial dari Weizmann Institute of Science di Israel, mendaftarkan lebih dari setengah (56%) dari semua paten universitas, lebih dari gabungan klaim 77 universitas lainnya. Pada tahap ini, belum ada definisi yang disepakati secara internasional tentang sumber daya genetik laut yang belum ditemukan. Namun, negosiasi sedang berlangsung untuk akses dan pembagian manfaat dari sumber daya ini (OECD, 2020b).

Tabel 1. Sektor Ekonomi Biru Berdasarkan *Blue Economy Development Framework*.

No	I. Sektor Mapan	No.	II. Sektor Berkembang
1.1	Penangkapan Ikan dan Boga Bahari	2.1	Budidaya Laut
1.2	Pelabuhan dan Pelayaran	2.2	Energi Terbarukan
1.3	Industri Galangan Kapal	2.3	Bioteknologi Laut
1.4	Eksplorasi Minyak dan Gas	2.4	Produk dan Layanan Teknologi Kelautan
1.5	Industri Manufaktur Kelautan		
1.6	Wisata Bahari		
1.7	Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Laut		
1.8	Pengerukan Pantai		

Sumber: BAPPENAS 2021

Ekonomi Biru di Majene Berbasis *Blue Economy Development Framework*

Kabupaten Majene sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah laut terluas di Provinsi Sulawesi Barat, telah menaruh perhatian besar terhadap potensi ekonomi biru di wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dari dokumen Laporan Akhir Aspek Bioteknologi Mangrove Kabupaten Majene yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Majene. Dokumen tersebut membahas secara tuntas potensi, tantangan, dan program pengembangan yang dapat dilakukan di empat wilayah, pertama dari sektor pariwisata, ekosistem mangrove, terumbu karang, dan rumput laut.

Kabupaten Majene juga telah menunjukkan perhatiannya terhadap pengembangan dan penelitian terkait ekonomi kelautan. Hal ini dapat dibuktikan dengan peran aktif Pemerintah Kabupaten Majene dalam penyediaan data dan informasi dalam basis data Satu Data Indonesia yang dapat diakses melalui open.data.majenekab.go.id. Dalam basis data tersebut disajikan beberapa hal terkait data rumah tangga perikanan tangkap dan ketersediaan perahu. Namun demikian, data yang disajikan masih perlu dimutakhirkan sesuai dengan kondisi terkini.

Hasil penelitian dengan menggunakan wawancara terstruktur menunjukkan bahwa Kabupaten Majene belum memiliki atau belum dapat menunjukkan dokumen turunan dari Kerangka Kerja Pembangunan Ekonomi Biru yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Organization for Economic Cooperation Development (OECD). Termuan ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait.

Tim peneliti berhasil memperoleh data primer dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Kelautan dan Perikanan beserta bagian-bagian terkait seperti Seksi Budidaya Perikanan, Seksi Perencanaan dan Pemasaran Perikanan, dan Seksi Pemberdayaan Nelayan. Hasil penelitian mendalam diperoleh data

bahwa meskipun disebutkan Kabupaten Majene memiliki dokumen turunan, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara faktual, bahkan Dinas Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa dokumen tersebut merupakan kewenangan provinsi, bukan kewenangan kabupaten.

Hasil wawancara mendalam dan studi pustaka yang telah kami telaah, meskipun Pemerintah Kabupaten Majene belum memiliki dokumen turunan Kerangka Kerja Pembangunan Ekonomi Biru dari Bappenas dan OECD, namun Pemerintah Kabupaten Majene telah memiliki dokumen serupa yang memetakan dan mengimplementasikan konsep ekonomi biru di Kabupaten Majene.

Beberapa penerapan ekonomi biru yang telah dilakukan Kabupaten Majene antara lain aspek yang sudah mapan seperti perikanan, budidaya laut, dan wisata bahari hingga industri galangan kapal, serta aspek yang menjanjikan (emerging) seperti energi terbarukan dan bioteknologi. Penelitian ini berhasil memetakan beberapa aspek ekonomi biru yang telah berhasil diwujudkan sesuai dengan cetak biru atau kerangka kerja pembangunan ekonomi biru (*Blue Economy Development Framework*). Beberapa di antaranya adalah;

1. Perikanan

Perikanan di Majene sudah berkembang secara menyeluruh namun belum sesuai dengan harapan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan data yang ada hanya usaha rumah tangga yang bergerak di bidang perikanan. Menurut Bapak Fachriadi, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan, belum banyak industri menengah atau besar yang bergerak di bidang perikanan karena izin usaha penangkapan ikan dengan kapal 5GT harus melalui izin usaha provinsi dengan wilayah laut kurang dari 12 mil. Sedangkan untuk kapal besar dengan daya tampung tangkapan sampai dengan 12 mil ke atas harus melalui izin pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan usaha penangkapan ikan skala menengah di Kabupaten Majene belum banyak.



Gambar 2. Perikanan Tangkap.

2. Akuakultur

Sektor budidaya perairan atau yang dikenal dengan akuakultur khususnya budidaya laut di Kabupaten Majene belum terealisasi dengan baik. Hasil wawancara dan penelusuran data menunjukkan belum ada usaha budidaya ikan maupun biota laut lainnya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene merilis data tahun 2020 bahwa belum ada usaha budidaya ikan maupun biota laut, masyarakat di Kabupaten Majene lebih tertarik untuk membudidayakan ikan air tawar atau ikan air payau seperti bandeng.

Namun, bukan berarti Pemerintah Kabupaten Majene tidak berupaya mengembangkan potensi budidaya ikan laut. Tahun 2021, Pemerintah Daerah melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) berupaya menggalakkan budidaya ikan kerapu, namun belum maksimal hasilnya (Antara, nd).

Budidaya rumput laut, meski memiliki potensi dan permintaan besar, namun Kabupaten

Majene belum mampu merealisasikannya karena dikhawatirkan akan mengganggu jalur penangkapan ikan dan rawan konflik, sehingga belum maksimal meski telah dicoba dan berhasil.

Sementara itu, dalam budidaya garam, pada tahun 2023 warga Majene berhasil membudidayakan garam dan berhasil memberdayakan warga. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan, garam di Majene memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan garam di Sulawesi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah merekomendasikan agar garam Majene masuk dalam identifikasi geografis.

3. Pengolahan Makanan Laut

Sektor industri pengolahan hasil laut di Kabupaten Majene belum berkembang dengan baik karena baik dinas kelautan maupun swasta belum memiliki *cold storage* atau gudang beku untuk menyimpan ikan. Hal ini membuat industri pengolahan ikan laut tidak berkembang, namun



Gambar 3. Budi Daya Tambak Ikan.

bukan berarti Kabupaten Majene tidak menjadi pelaku industri pengolahan ikan. Menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Pemasaran Ikan, Kabupaten Majene merupakan pemasok bahan baku industri pengalengan ikan seperti ikan sarden dan ikan tari dengan bahan baku ikan layang seperti yang dilakukan oleh CV Sakura Prima, salah satu usaha kecil menengah di Somba, Majene yang memasok ikan layang untuk diekspor ke Jepang. Ikan-ikan tersebut diseleksi, terutama ikan layang yang tidak bertelur, untuk dijadikan bahan umami di Jepang.

Lebih lanjut, Dinas Kelautan dan Perikanan juga memaparkan, Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat telah mengembangkan produk makanan kaleng dengan bahan dasar ikan laut dan cita rasa khas Sulawesi Barat atau Majene yaitu Bau Piapi, namun belum dijadikan industri, masih dalam tahap inisiatif.

4. Galangan kapal

Industri galangan kapal di Kabupaten Majene berkembang cukup baik, bahkan pemerintah pusat mendukung keberadaan industri galangan kapal tersebut. Saat ini, terdapat tiga titik industri galangan kapal, yakni di Kecamatan Somba, Kecamatan Rengas, dan Kabupaten Banggae. Industri galangan kapal yang didukung pemerintah daerah masih kecil karena ukuran kapal yang dapat dibuat oleh perajin kapal masih 6 x 21 m.

6. Pariwisata Pesisir

Sektor pariwisata pesisir di Kabupaten Majene sebagai salah satu sektor pembangunan ekonomi biru telah berkembang cukup baik, meskipun sarana dan prasarannya masih perlu ditingkatkan. Beberapa objek wisata dan daya

tarik wisata telah terwujud meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Seperti wisata memancing sambil berlayar, berenang di pinggir pantai, dan berlayar menggunakan perahu, bahkan ada atraksi balap perahu atau yang biasa disebut dengan lomba sandeq setiap tahunnya.

Perairan Teluk Mandar di sekitar Pantai Barane memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan menjadi wisata kapal pesiar atau wisata berlayar. Namun, untuk pengembangan lebih lanjut diperlukan investasi yang tidak sedikit. Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Majene telah berbincang dengan pelaku pariwisata dari Belanda dan Italia terkait kemungkinan penyelenggaraan Sailing Sandeq dengan peserta sekitar delapan orang sesuai standar penumpang Sandeq.

Hanya saja, masalah pengembangan wisata pesisir terkendala oleh minimnya akomodasi dan amenitas terkait pariwisata di Majene. Hotel-hotel di sekitar Majene masih belum bisa menyediakan kamar yang mampu menampung hingga 500 orang, belum lagi industri amenitas yang belum mendukung, seperti industri shampo, industri sabun, catering, dan laundry yang belum mampu menyediakan kapasitas besar.

7. Pendidikan dan Konservasi

Pemerintah Kabupaten Majene telah mewujudkan salah satu sektor ekonomi biru atau ekonomi berbasis kelautan, yaitu kegiatan konservasi dan edukasi terkait satwa laut seperti penyu. Kegiatan konservasi penyu ini memang masih dalam skala kecil, namun patut dicermati karena Majene merupakan daerah yang memiliki tiga jenis penyu yang dilindungi undang-undang, yaitu Penyu Sisik, Penyu Hijau, dan Penyu Lekang.



Gambar 4. Industri Galangan Kapal Kecil



Gambar 5. Wisata Bahari dan Atraksi Sandeq Race.

8. Bioteknologi

Kabupaten Majene yang memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Sulawesi Barat telah menerapkan kegiatan bioteknologi dalam pemanfaatan garis pantai. Pemerintah Kabupaten Majene bersama dengan Universitas Sulawesi Barat dan warga di Majene giat melakukan penanaman mangrove sebagai tanaman pelindung abrasi pantai.

Tantangan Penerapan *Blue Economy Development Framework* di Kabupaten Majene

Selain belum adanya dokumen turunan atau dokumen yang diadopsi dari *Blue Economy Development Framework*, Pemerintah Kabupaten Majene juga belum mampu merealisasikan seluruh sektor ekonomi biru yang ada. Dokumen *Blue Economy Development Framework* memiliki tiga belas (13) sektor ekonomi, baik yang sudah

mapan (sebelas sektor) maupun yang prospektif (dua sektor). Kabupaten Majene dengan segala potensinya, baru mampu merealisasikan delapan sektor. Itu pun sebagian besar masih dalam tahap awal.

Tim Peneliti dalam hal ini mencoba menelusuri kendala apa saja yang menyebabkan Ekonomi Biru di Majene kurang berkembang padahal potensinya sangat besar. Berikut ini adalah lima kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Majene dalam mewujudkan kegiatan ekonomi berbasis kelautan atau ekonomi biru;

1. Pemahaman Masyarakat Masih Kurang

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Majene belum menyadari potensi luar biasa untuk mengembangkan ekonomi biru. Masyarakat di Majene cenderung mengabaikannya atau

Tabel 2. Perbandingan Sektor BEDF dan Ekonomi Biru di Majene.

No.	<i>Blue Economy Development Framework</i>	No.	Pengembangan Ekonomi Biru di Kabupaten Majene
I.	Sektor Mapan	I.	Sektor Mapan
1.1	Penangkapan Ikan dan Boga Bahari	1.1	Perikanan
1.2	Pelabuhan dan Pelayaran	1.2	Pelabuhan
1.3	Industri Galangan Kapal	1.3	Industri Galangan Kapal
1.4	Eksplorasi Minyak dan Gas	1.4	-
1.5	Industri Manufaktur Kelautan	1.5	Pengolahan Makanan Laut
1.6	Wisata Bahari	1.6	Wisata Bahari
1.7	Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Laut	1.7	Pendidikan dan Konservasi
1.8	Pengerukan Pantai	1.8	-
II.	Sektor Berkembang	II.	Sektor Berkembang
2.1	Budidaya Laut	2.1	Budidaya Laut
2.2	Energi Terbarukan	2.2	-
2.3	Bioteknologi Laut	2.3	Bioteknologi Laut
2.4	Produk dan Layanan Teknologi Kelautan	2.4	-

Sumber: BAPPENAS 2021 dan Hasil Penelitian.

menganggapnya sebagai kendala dalam menjalankan aktivitasnya. Misalnya, rumput laut memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena memiliki pasar yang besar. Kabupaten Majene dengan wilayah pesisir yang luas dapat membudidayakan rumput laut, namun hal tersebut sulit dilakukan mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui potensi rumput laut, belum mengetahui cara membudidayakannya, dan menganggapnya sebagai kendala dalam melaut atau menangkap ikan.

2. Perizinan yang Rumit

Minimnya investor atau pihak swasta yang mau mengembangkan ekonomi berbasis kelautan ini dikarenakan proses perizinan yang rumit dan mahal. Padahal, dari sisi potensi dan produksi, berbagai sektor di Majene terbilang cukup tinggi. Namun, belum ada investor dalam maupun luar negeri yang berminat menggarap potensi dan produksi tersebut, serta belum banyak pelaku usaha kecil, menengah, dan mikro atau koperasi yang terlibat dalam pengembangan sektor ekonomi biru tersebut. Persoalan perizinan yang rumit menjadi kendala terbesar dalam hal investasi. Misalnya, potensi produksi garam di Kabupaten Majene terbilang cukup tinggi, apalagi dengan segala keunikan pantai-pantai yang ada di Majene. Namun, setiap pelaku usaha yang mau menggarap potensi tersebut terkendala oleh masalah perizinan usaha yang mengharuskan pendirian laboratorium. Hal ini membuat calon investor enggan untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Majene.

3. Cuaca yang Tidak Dapat Diprediksi

Salah satu faktor yang menghambat masyarakat di Majene dalam mengembangkan potensi ekonomi berbasis kelautan adalah kondisi cuaca yang tidak menentu dan minimnya pengembangan teknologi untuk menghadapi perubahan cuaca tersebut. Seperti diketahui Kabupaten Majene memiliki cuaca ekstrem yang bertolak belakang, pada suatu waktu Majene dapat berada pada titik panas di musim kemarau, dengan suhu mencapai 36 derajat celsius, sedangkan pada musim hujan, curah hujan yang tinggi memiliki debit air yang sangat tinggi disertai angin kencang dari laut, perpaduan cuaca ini menjadikan Majene berada pada posisi kabupaten atau kota dengan cuaca ekstrem. Sebagai salah satu contoh, pelaksanaan budidaya ikan dan budidaya udang memerlukan air yang stabil dengan gelombang yang terkendali, namun karena belum adanya teknologi yang mampu merekayasa atau mengantisipasi perubahan cuaca,

maka budidaya ikan dan budidaya udang mengalami kegagalan.

4. Anggaran Terbatas

Pemerintah Kabupaten Majene telah berupaya untuk memaksimalkan potensi ekonomi berbasis kelautan atau yang dapat disebut ekonomi biru, namun Pemerintah Daerah tidak dapat memfasilitasi semua sektor karena keterbatasan anggaran. Pemerintah Kabupaten Majene tidak dapat terlibat langsung dalam mengelola sektor ekonomi biru, oleh karena itu Pemerintah Daerah memberdayakan warga dengan insentif yang tersedia namun dapat menggerakkan beberapa sektor, itupun anggarannya terpusat sehingga tidak dapat dijalankan secara langsung.

5. Kurangnya Pemasaran

Kendala terakhir yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ekonomi berbasis kelautan adalah minimnya pemasaran baik dari pelaku usaha perorangan maupun warga secara keseluruhan tentang potensi ekonomi biru di Majene. Belum banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui Kabupaten Majene beserta produk unggulannya, sehingga minimnya permintaan dari warga Indonesia maupun mancanegara.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Simpulan

Kabupaten Majene sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah laut terluas di Provinsi Sulawesi Barat, telah menaruh perhatian besar terhadap potensi ekonomi biru di wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dari dokumen Laporan Akhir Aspek Bioteknologi Mangrove Kabupaten Majene yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Majene. Dokumen tersebut membahas secara tuntas potensi, tantangan, dan program pengembangan yang dapat dilakukan pada empat bidang, pertama: pariwisata, ekosistem mangrove, terumbu karang, dan rumput laut.

Kabupaten Majene juga menunjukkan perhatiannya terhadap pengembangan dan penelitian terkait ekonomi kelautan. Hal ini dapat dibuktikan dengan peran aktif Pemerintah Kabupaten Majene dalam penyediaan data dan informasi pada basis data Satu Data Indonesia yang dapat diakses melalui opendata.majenekab.go.id. Basis data tersebut menyajikan beberapa hal terkait data rumah tangga perikanan tangkap dan ketersediaan perahu.

Hanya saja Kabupaten Majene belum memiliki dokumen turunan atau dokumen yang diadopsi dari Blue Economy Development Framework oleh karenanya pengembangannya masih berbasis pada laporan Badan Perencanaan Daerah. Pemerintah Kabupaten Majene juga belum mampu merealisasikan seluruh sektor ekonomi biru yang ada. Dokumen *Blue Economy Development Framework* memiliki dua belas (12) sektor ekonomi, baik yang sudah mapan (sebelas sektor) maupun yang prospektif (dua sektor) sementara Kabupaten Majene dengan segala potensinya, baru mampu merealisasikan delapan sektor. Itu pun sebagian besar masih dalam tahap inisiatif, belum pada tahap pengembangan.

Hal ini terjadi bukan karena salah satu pihak namun pengimplementasian BEDF memiliki sejumlah tantangan seperti (1) Minimnya pemahaman masyarakat (2) Perizinan yang sulit (3) Faktor cuaca (4) Ketersediaan Anggaran dan (5) Kurangnya Pemasaran

Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Majene agar lebih serius dalam mengembangkan ekonomi berbasis kelautan. Skala prioritas dapat diberikan terlebih dahulu terhadap pengembangan infrastruktur yang berpotensi besar, dan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, seperti sektor pariwisata. Kabupaten Majene perlu mengembangkan potensi wisata pesisir yang luar biasa sebagai sumber pendapatan masyarakat serta pendapatan daerah; dengan investasi infrastruktur yang memadai. Pengembangan infrastruktur bisa lebih masif dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta /investor yang tertarik dalam pengembangan ekonomi biru. -

Skala prioritas kedua dapat diberikan kepada sektor-sektor yang memiliki pangsa ekspor dengan memberikan insentif maupun pelatihan sumber daya manusia, yaitu sektor perikanan dan sektor industri galangan kapal. Pemerintah Kabupaten Majene bisa lebih berkolaborasi dengan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia maupun pengembangan produk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis berterima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sulawesi Barat selaku pemberi sponsor

dalam melakukan penelitian dan penulisan artikel ilmiah ini. Berdasarkan NO SK 1944/UN55/HK.03/2024.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi masing-masing penulis dalam penulisan akalah ini adalah: Saomi Rizqiyanto sebagai kontributor utama, Dwi Rianisa Mausili sebagai kontributor anggota. Penulis menyatakan bahwa Surat Kontribusi Penulis telah dilampirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna, Z. (2020, August 28). *75 tahun merdeka, Indonesia masih punya banyak potensi kembangkan sektor kelautan dan perikanan*. Diambil kembali dari The Conversation Indonesia: <https://theconversation.com/75-tahun-merdeka-indonesia-masih-punya-banyak-potensi-kembangkan-sektor-kelautan-dan-perikanan-143188>.
- Ansong, J. O., Isaksson, I., Quesada-Silva, M., Smith, J., Suárez de Vivero, J. L., Varjopuro, R., Zhang, Z., Iglesias-Campos, A., Intergovernmental Oceanographic Commission, & Europäische Kommission (Eds.). (2021). *MSPglobal international guide on marine/maritime spatial planning*. Intergovernmental Oceanographic Commission.
- Antara, A. (2021, July 27). *DKP Alokasikan Dana 200 Juta untuk KJA*. <https://makassar.antaranews.com/berita/40756/dkp-majene-alokasikan-rp200-juta-kembangkan-kja>.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Balitbang, B. (2020). *Potensi, Strategi Dan Program Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Sosial Ekonomi*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majene.
- Bappenas (2019), *Indonesia Vision 2045*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/jakarta-menteri-ppnkepala-bappenasbambang-brodjonegoro-berbicara-mengenai-pentingnya-penyelarasan-vision-indonesia-2045dengan-vi/>.
- Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlus Open*, 8-14.
- Bennett, A., Patil, P., Kleisner, K., Rader, D., Virdin, J., & Basurto, X. (2019). *Contribution of Fisheries to Food and Nutrition Security*.
- Bouso, R. (2020), Offshore oil and gas boom to continue, <https://www.reuters.com/article/usoiloffshore/offshore-oil-and-gas-boom-to-continue-rystad-idUSKBN1ZD1N6>.

- Cohen, P. J., Allison, E. H., Andrew, N. L., Cinner, J., Evans, L. S., Fabinyi, M., Garces, L. R., Hall, S. J., Hicks, C. C., Hughes, T. P., Jentoft, S., Mills, D. J., Masu, R., Mbaru, E. K., & Ratner, B. D. (2019). Securing a Just Space for Small-Scale Fisheries in the Blue Economy. *Frontiers in Marine Science*, 6, 171. <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00171>.
- Crawford Heitzmann, M. (2006), "Don't forget the coastal waters", OECD Observer, No. 254, OECD Publishing, Paris, March, www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/1807/Don_92t_forget_the_coastal_waters!.html.
- FAO (2020a), The State of World Fisheries and Aquaculture 2020, FAO, <http://dx.doi.org/10.4060/ca9229en>.
- Fry, J. et al. (2018), "Feed conversion efficiency in aquaculture: Do we measure it correctly?", *Environmental Research Letters*, Vol. 13/2, p. 024017, <http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/aaa273>.
- Hicks, C. C., Cohen, P. J., Graham, N. A. J., Nash, K. L., Allison, E. H., D'Lima, C., Mills, D. J., Roscher, M., Thilsted, S. H., Thorne-Lyman, A. L., & MacNeil, M. A. (2019). Harnessing global fisheries to tackle micronutrient deficiencies. *Nature*, 574(7776), 95–98. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1592-6>.
- IEA (2019), Renewables 2019: Analysis and Forecast from 2019-2024, International Energy Agency, Paris, <https://www.iea.org/renewables2019/>.
- McBain, D. (2023, May 16). What is the role of the blue economy in a sustainable future. *London School of Economics*. <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-is-the-role-of-the-blue-economy-in-a-sustainable-future/>
- OECD. (2021). *Sustainable Ocean Economy Country Diagnostics of Indonesia* (OECD Development Perspectives 5; OECD Development Perspectives, Vol. 5). <https://doi.org/10.1787/9bc36234-en>.
- OECD (2020b), Sustainable Ocean for All: Harnessing the Benefits for Developing Countries, The Development Dimension, OECD Publishing, Paris, <https://dx.doi.org/10.1787/bede6513-en>.
- Pane, D. (with Indonesia, & Organisation for Economic Co-operation and Development). (2022). *Blue economy: Development framework for Indonesia's economic transformation*. Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Bappenas).
- Patton, M. Q. (2002). Qualitative, research & evaluation methods. Thousand Oaks, California: Sage publications Inc.
- PUSHIDROSAL. (2018, August 28). *Data Kelautan Yang Menjadi Rujukan Nasional Diluncurkan*. <https://www.pushidrosal.id/berita/5256/data-kelautan-yang-menjadi-rujukan-nasional-diluncurkan>.
- Rosales, R. et al. (2017), "Value chain analysis and small-scale fisheries management", *Marine Policy*, Vol. 83, pp. 11–21, <http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2017.05.023>.
- Sugandhi, H. (2022, July 27). *Mendongkrak Kontribusi PDB Perikanan*. Diambil kembali dari KOMPAS: <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/25/mendongkrak-kontribusi-pdb-perikanan>.
- Tito, C. and E. Ampou (2020), "Coral reefs ecosystem degradation at Nusa Penida, Bali", *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 429, p. 012053, <http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/429/1/012053>.
- World Bank (2019), Indonesia Economic Quarterly: Oceans of Opportunity, <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31993>.